

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, N.S. 2010. Evaluasi Pendapatan Perangkat Desa di Kabupaten Sleman. Fakultas Pertanian. Universitas Gadjah Mada. Skripsi
- Anonim. 2014 <<http://speunand.blogspot.com/2011/12/sumber-daya-tanah.html>>. Diakses pada 12 September 2014.
- Anonim. 2014.<<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37792/4/Chapter%20II.pdf>>. Diakses pada 15 November 2014.
- Barlowe, R. 1972. *Land Resource Economics*. Pretice-Hall Inc, New Jersey.
- Barlowe, R. 1986. *Land Resource Economics*. The Economics of Real Estate. Prentice-Hall Inc. New York,
- Daniel, M. 2001. Pengantar Ekonomi Pertanian. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Djamali, R.A., 2000. Manajemen Usahatani. Departemen Pendidikan Nasional Politeknik Pertanian Negeri Jember Jurusan Manajemen Agribisnis, Jember.
- Ghozali, I. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Progra SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gilarso, T. 2003. Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro edisi Revisi. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Handayani. 2010. Efektivitas Kompensasi Pendapatan dari Tanah Bengkok. Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Tesis
- Kay, R.D. 1981. Farm Management Planing Control and Implementation. International Student Edition. McGraw-Hill International Book Company, New York.
- Kurniasari, I. 2010. Pemanfaatan Tanah Bengkok oleh Perangkat Desa di Kecamatan Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekola Tinggi Pertanian Negara. Skripsi
- Mahartati. 1990. Studi Komparatif Penguasaan Lahan dalam Usaha Pembuatan Batu Bata di Dua Desa Wilayah Kabupaten Klaten. Fakultas Geografi Universitaas Gadjah Mada. Skripsi.
- Moehar. 2001. Pengantar Ekonomi Pertanian. PT Bumi Aksara, Jakarta
- Mubyarto, 1989. Pengantar Ekonomi Pertanian Edisi Ketiga. Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Jakarta

- Nawawi, H. 1985. *Metodelogi Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ndraha, T. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. PT Bumi Aksara, Jakarta
- Patty, Z. 2010. Kontribusi Komoditi Kopra terhadap Pendapatan Rumah Tangga Tani di Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Agroforestri* 3: 215.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Dea, dan Sekretaris BPD.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2000
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penghasilan Kades dan Perangkat Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan
- Peraturan Bupati Kabupaten Bantul No. 3 Tahun 2012 Tentang Pemberian Tambahan Kesejahteraan Bagi Lurah Desa dan Pamong Desa Se-Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2012
- Peraturan Bupati Kabupaten Bantul No. 48 Tahun 2009 tentang Pemutakhiran Data Tanah Kas Desa di Kabupaten Bantul
- Samuelson, Paul, A dan Nordhaus D, William. 2002. *Ekonomi* Edisi 12 Jilid 2. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Saparin, S, 1986. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sendhikasari, 2012. Status Kepegawaian Perangkat Desa. *Info Singkat Pemerintahan dalam Negeri* Vol. IV, 24 (17)
- Soekartawi. 2003. *Teori Ekonomi Produksi Dengan Pokok Bahasan Analisis Fungsi Cobb-Douglass*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sukirno, S. 1994. *Teori Pengantar Edisi Ketiga Mikro Ekonomi*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sukirno, S. 2002. *Ekonomi Pembangunan*. Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.
- Sukriono, D. 2010. *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*. Setara Press, Malang
- Supadi dan Nurmanaf, A.R. 2004. *Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga Pedesaan dan Kaitannya dengan Tingkat Kemiskinan*. Soca (Socio-Economic of Agriculture and Agribusiness) Vol. 6.

- Suratiyah, K. 2011. Ilmu Usahatani. Penebar Swadaya, Jakarta
- Tohir, A. 1991. Seuntai Pengetahuan Usahatani. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (3)
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Pokok Bagi Hasil (UUPBH) 1960